



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SAID ABDULLAH
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 147584

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **7.225.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 984 m2/216 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.400.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 196 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
5. Tanah Seluas 160 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 48.000.000
6. Tanah Seluas 2.896 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.737.600.000
7. Tanah Seluas 2.817 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 1.690.200.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/456 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 348 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **104.000.000**



1. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
80.000.000
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
7.000.000
3. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	12.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	56.262.862
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	7.398.062.862
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	7.398.062.862

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.